

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan dalam suatu negara sangatlah penting untuk mencapai kesejahteraan seluruh rakyatnya. Pembangunan ekonomi merupakan masalah penting dalam perekonomian suatu negara. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses dimana pemerintah dan seluruh komponen masyarakat mengelola sumber daya yang ada, lalu dapat membentuk kerjasama antara pemerintah daerah dan sektor swasta yang nantinya dapat menambah lapangan pekerjaan baru dan menambah perkembangan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan melalui pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang merata.

Menurut Shanti dan Maruto (2007) dalam Noviar (2021) pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu keberhasilan dan target yang sangat penting dalam proses pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro (2004:87) selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya tujuan dari usaha pembangunan ialah untuk menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran.

Adapun teori yang pertama kali digagas oleh Albert Otto Hirschman pada 1954 yaitu teori *trickle down effect* yang menjelaskan bahwa kemajuan dapat diperoleh oleh sekelompok masyarakat akan sendirinya menetes kebawah sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang nantinya menumbuhkan berbagai kondisi agar terciptanya distribusi pertumbuhan ekonomi

yang merata. *Trickle Down Effect* merupakan salah satu pendekatan dalam strategi tidak langsung pembangunan ekonomi untuk pemeratakan kesejahteraan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena proses pemerataan kesejahteraan dilakukan dengan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi pada sektor utama dan kemudian sektor utama tersebut akan menyebarkan hasil dari pertumbuhan ekonomi kepada sektor lainnya. Maka dengan adanya proses penyebaran ini diharapkan akan membawa perbaikan kesejahteraan masyarakat (Larasati, 2017). Simon Kuznets dalam Kuncoro (2006:2) telah mengemukakan bahwa pada tahap-tahap awal pembangunan ekonomi, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata. Hipotesis ini dikenal sebagai hipotesis “U-terbalik” Kuznets. Menurut Kuznet distribusi pendapatan akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.

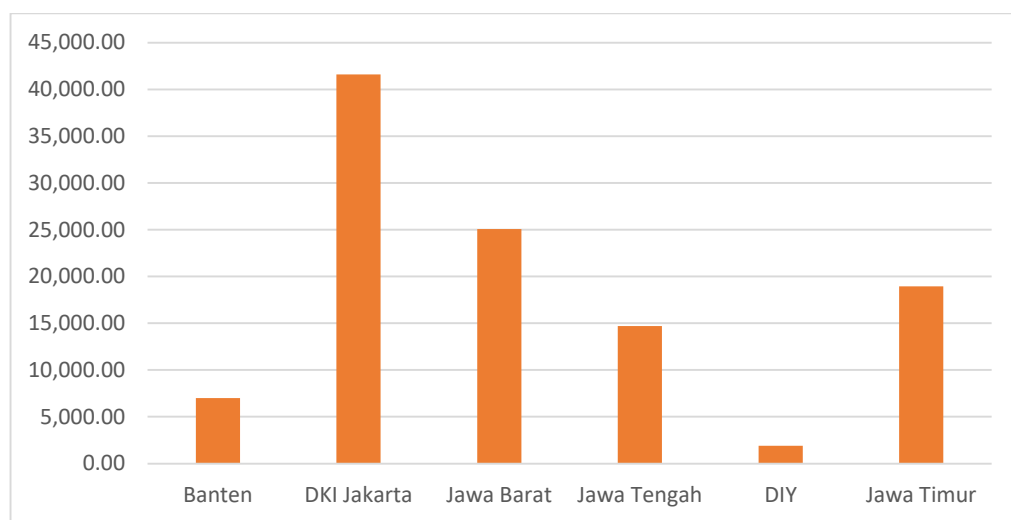
Kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara. Pembangunan sudah pasti menjadi otoritas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola, membangun, serta mengembangkan daerahnya. Tujuan utama dalam pelaksanaan pembangunan ialah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan disertai pemerataan hasil pembangunan. Akan tetapi, pada kenyataannya pembangunan dalam lingkup negara tidak selalu merata. Hal ini dikarenakan ada beberapa daerah yang dapat mencapai pertumbuhan secara signifikan dan ada pula beberapa daerah lainnya mengalami pertumbuhan secara lambat. Daerah-daerah yang tidak mengalami kemajuan yang

sama disebabkan karena kurangnya sumber daya yang dimiliki, adanya kecenderungan pemilik modal/ investor memilih daerah perkotaan atau daerah yang memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi dan tenaga kerja yang terampil, serta ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari pemerintah pusat kepada daerah (Kuncoro, 2004:97).

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh setiap daerah tidak dapat terlepas dari permasalahan pertumbuhan dan ketidakmerataan pembangunan antar daerah atau wilayah satu dengan wilayah lainnya. Maka dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan belum tentu dapat mengatasi permasalahan terhadap ketimpangan antar daerah. Menurut Shinta dan Maruto (2010) dalam Dhyatmika (2013) disparitas pertumbuhan regional dapat menyebabkan kesenjangan antar daerah semakin meningkat, hal ini terjadi karena adanya perbedaan tingkat pembangunan dan pendapatan masyarakat yang membawa dampak perbedaan tingkat kesenjangan antar daerah. Adapun yang dapat menggambarkan suatu daerah memiliki tingkat ketimpangan dapat dilihat dari perbandingan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) antar wilayah. Hubungan PAD erat kaitannya dengan pendapatan masyarakat, karena PAD sendiri bersumber dari pajak, retribusi, dan pendapatan lain yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.

Adapun perbandingan PAD antar Provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2021 seperti gambar 1.1, dari keenam provinsi tersebut dapat dilihat bahwa Provinsi DKI Jakarta lebih unggul dengan nilai PAD Rp41.606,31 miliar. Menurut Kementerian Keuangan, DKI Jakarta memang memiliki kapasitas fiskal yang tinggi dan APBD

yang cukup tinggi dibandingkan daerah lain karena DKI Jakarta merupakan ibukota negara dan sekaligus pusat perekonomian dan bisnis, yang tentunya hal ini yang akan menambah PAD yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain. Adapun Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berdasarkan grafik tersebut memiliki pendapatan asli daerah terkecil dibandingkan provinsi lain yang ada di Pulau Jawa dengan PAD senilai Rp1.900,92 miliar.

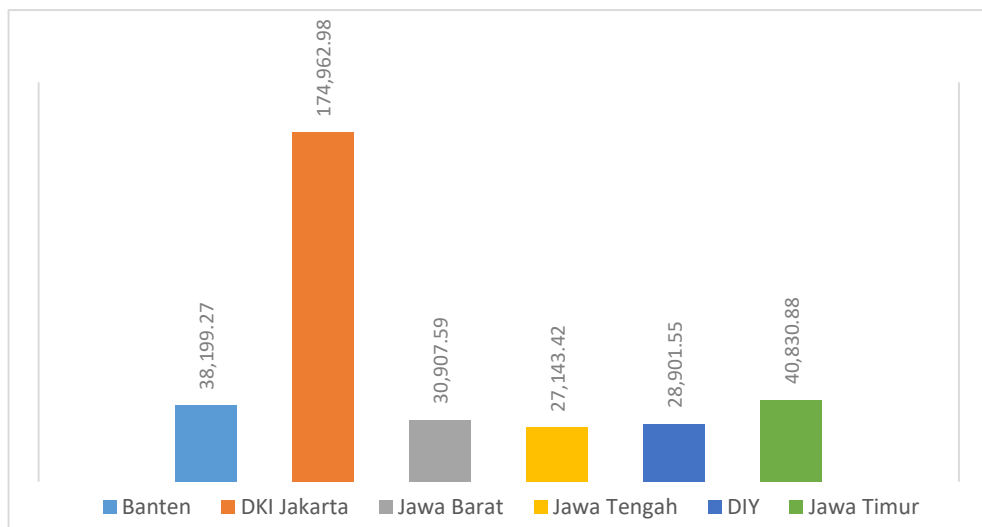


Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (diolah kembali)

Gambar 1.1
Perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2021 (Miliar Rupiah)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki pendapatan asli daerah terkecil dibandingkan provinsi lain yang ada di Pulau Jawa dengan PAD senilai Rp1.900,92 miliar. Padahal Provinsi DIY memiliki sejumlah objek pariwisata yang begitu banyak dan indah dengan ciri khas adat Jawa yang kuat menjadi tempat nyaman dan berbagai kuliner yang dijual lebih terjangkau harganya. Hubungan antara PAD dan ketimpangan bergantung pada bagaimana PAD itu dapat dikelola dan digunakan dengan baik oleh pemerintah

daerah. Ketika dalam penggunaannya dikelola dengan adil serta efisien maka hal ini dapat mengurangi ketimpangan yang terjadi dan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif. Akan tetapi bila PAD tidak dikelola dengan baik, maka hal ini dapat memperburuk ketimpangan yang terjadi.

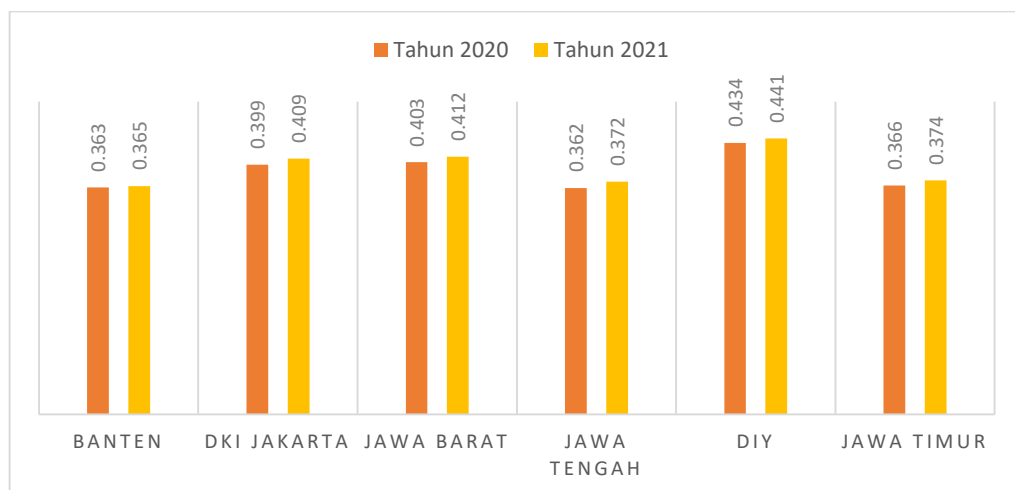


Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah kembali)

Gambar 1. 2
Perbandingan PDRB Per Kapita antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2021
(Miliar Rupiah)

Gambar 1.2 menunjukkan data PDRB per kapita untuk memperkuat adanya ketimpangan yang terjadi di wilayah Pulau Jawa. PDRB per kapita menunjukkan nilai pendapatan rata-rata per satu orang penduduk di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Bahwa daerah dengan pendapatan per kapita tertinggi di antar provinsi di Pulau Jawa yaitu Provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta memiliki pendapatan per kapita sebesar Rp174.962,98 Miliar, hal ini dikarenakan DKI Jakarta memiliki sektor ekonomi yang berkembang pesat, yaitu sektor keuangan, perdagangan, industri, dan jasa. Tidak hanya itu DKI Jakarta merupakan pusat administrasi, maka tak heran hal ini dapat menambah pendapatan bagi sebagian

besar penduduknya. Pendapatan di Provinsi DIY menunjukkan angka Rp28.901,55 Miliar dan menjadi salah satu provinsi di urutan pendapatan per kapita terendah kedua. Memang pada angka PAD memiliki nilai terendah diantara provinsi yang ada di pulau jawa, akan tetapi jika dilihat dari pendapatan per kapita yang diperoleh, Provinsi DIY memiliki pendapatan yang cukup meningkat, dikarenakan DIY menjadi salah satu daerah pariwisata andalan maka hal inilah yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat di daerah tersebut.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah kembali)

Gambar 1.3
Perbandingan Gini Ratio antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2020-2021

Gambar 1.3 menunjukkan data Gini Ratio antar provinsi di Pulau Jawa berfluktuatif dan Provinsi DIY memiliki tingkat ketimpangan tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, dengan angka gini ratio Provinsi DIY terus mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2020 sebesar 0.434 dan tahun 2021 sebesar 0.441. Provinsi Jawa Tengah memiliki angka gini ratio terendah dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa, dengan angka gini ratio tahun 2020 sebesar 0.362 dan tahun 2021 sebesar 0.372. Setiap provinsi pada tiap tahunnya

selalu mengalami peningkatan angka gini ratio, hal ini menandakan bahwa ketimpangan selalu meningkat dan bertambah setiap tahunnya.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang terletak di bagian selatan pulau jawa. Provinsi ini merupakan peleburan dari Negara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Paku Alaman. Walaupun secara geografis DIY ini merupakan daerah kedua terkecil setelah DKI Jakarta, akan tetapi provinsi ini telah dikenal sebagai tempat tujuan pariwisata tingkat nasional maupun internasional. Dengan kentalnya corak adat budaya, pendidikan, juga pariwisata yang sudah dikenali oleh masyarakat dalam maupun luar negeri, maka hal inilah yang membuat perekonomian DIY bergerak dengan cepat dan tumbuh dari tahun ke tahun.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kondisi wilayah atau daerah yang berbeda dan cenderung timpang baik dari segi pendapatan masyarakat, jumlah penduduk, potensi wilayah yang dimiliki, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bahkan infrastruktur yang tidak merata. Kabupaten Gunung Kidul adalah salah satu wilayah atau daerah terluas yang ada di Provinsi DIY dengan luas mencapai 1.485 km², akan tetapi akses jalan yang dimiliki paling sedikit dibandingkan daerah lain. Sementara di Kota Yogyakarta sebagai wilayah paling sempit diantara kabupaten lainnya yang ada di Provinsi DIY dengan luas hanya 32.5 km² justru akses jalan yang dimiliki paling banyak, hal ini dikarenakan kota Yogyakarta merupakan Ibukota Provinsi DIY dan pusat administrasi. Oleh karena itu, banyak sekali lembaga pemerintahan provinsi yang berpusat di Kota Yogyakarta. Maka dengan data tersebut kesenjangan-kesenjangan seperti itu yang

kemudian akan menambah kesenjangan ekonomi dan pembangunan antar wilayah di provinsi DIY.

Tabel 1. 1
Perbandingan Jumlah Penduduk, PDRB, dan PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	PDRB (Juta Rupiah)	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten Bantul	1.050.308	19.779.662	18.832.249
Kabupaten Gunung Kidul	767.464	14.227.788	18.538.704
Kabupaten Kulon Progo	442.724	8.778.800	19.829.058
Kabupaten Sleman	1.265.429	35.786.977	28.280.509
Kota Yogyakarta	444.295	28.410.013	63.944.031

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah kembali)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di Kabupaten Sleman dan dengan PDRB mencapai Rp35.786.977 Juta. Kab. Sleman merupakan daerah dengan pusatnya pendidikan yang ada di Provinsi DIY, sebagai contohnya ada salah satu universitas yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menjadi perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia, maka banyak sekali masyarakat Indonesia memilih UGM menjadi salah satu universitas pilihannya. Tak hanya itu, terdapat objek wisata yaitu Candi Prambanan dan objek wisata alam lainnya, maka hal inilah yang dapat menambah kontribusi terhadap PDRB daerah tersebut. Akan tetapi pendapatan per kapita di Kabupaten Sleman berada di posisi kedua tertinggi dengan nilai mencapai Rp28.280.509 Juta. Sedangkan Kab. Kulon Progo memiliki jumlah penduduk dan PDRB yang relatif kecil dibandingkan daerah lain, salah satu faktornya ialah ketersediaan infrastruktur

yang kurang baik seperti akses jalan yang dapat membatasi pergerakan masyarakat di daerah tersebut, akan tetapi memiliki pendapatan per kapita relatif tinggi mencapai Rp19.829.058 Juta. Adapun Kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk relatif sedikit dan pendapatan per kapita tertinggi diantara daerah lain yang ada di Provinsi DIY. Hal ini dikarenakan Kota Yogyakarta merupakan pusat administrasi provinsi dan pastinya pemerintah lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur di wilayah perkotaan agar mendukung pertumbuhan ekonomi. Besar kecilnya PDRB sangat bergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang mempengaruhi ketimpangan antar daerah tersebut.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah yaitu perbedaan sumber daya alam, faktor demografis termasuk kondisi tenaga kerja, alokasi dana pembangunan antar wilayah baik investasi pemerintah maupun investasi swasta, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, dan mobilitas barang dan jasa (Sjafrizal, 2012) dalam (Dhyatmika, 2013:2). Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan diantaranya investasi atau perpindahan modal, penduduk miskin, dan IPM yang diperoleh dari tingkat pendidikan, kesehatan, dan standar hidup (Jhingan, 2014:212).

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah dengan PDRB yang masih relatif rendah dan tingkat ketimpangan yang tinggi sesuai dengan PDRB per kapita, maka diharapkan dengan mengetahui besarnya tingkat ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota dan adanya pengklasifikasian wilayah di provinsi DIY akan dapat membantu pemerintah daerah maupun provinsi dalam membuat kebijakan

pembangunan di daerah agar tepat sasaran sesuai dengan klasifikasi wilayah yang bersangkutan dan dapat membantu dalam menanggulangi tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Analisis Ketimpangan Pembangunan antar Kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2021”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat teridentifikasi beberapa masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Seberapa besar tingkat ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota Provinsi DIY tahun 2012-2021?
2. Bagaimana pola dan struktur pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten/kota Provinsi DIY tahun 2012-2021?
3. Apakah hubungan antara ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi DIY tahun 2012-2021 membentuk suatu pola “U-terbalik”?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi antar kabupaten/kota Provinsi DIY tahun 2012-2021.
2. Untuk mengetahui pola dan struktur pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten/kota Provinsi DIY tahun 2012-2021.

3. Untuk mengetahui hubungan antara ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi DIY tahun 2012-2021 membentuk suatu pola “U-terbalik”.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi peneliti, sebagai sarana pengetahuan terkait ketimpangan pembangunan, pengklasifikasian pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah dan hubungannya terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pembangunan daerah untuk dapat menyusun perencanaan pembangunan yang baik dimasa mendatang dalam rangka mengurangi dan mengatasi ketimpangan yang terjadi antar kabupaten/kota di Provinsi DIY, sehingga ketimpangan pembangunan yang terjadi lebih rendah dan pada akhirnya akan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi agar dapat merata di setiap wilayahnya.
3. Bagi masyarakat, sebagai penambah pengetahuan, informasi, dan wawasan khususnya mengenai ketimpangan pembangunan yang terjadi di daerah kabupaten/kota di Provinsi DIY.
4. Bagi peneliti lain, sebagai bahan informasi ataupun rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan terhadap wilayah antar kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada rentang waktu 2012-2021. Data yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini diperoleh melalui situs dari Badan Pusat Statistik Provinsi DIY, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai Bulan September 2023. Adapun jadwal penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1. 2
Jadwal Penelitian

Kegiatan	2023																2024
	Sep				Okt				Nov				Des				Jan
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
Pengajuan Outline Judul		■															
Penyusunan proposal skripsi		■	■	■	■	■	■	■									
Sidang proposal skripsi									■								
Revisi proposal skripsi										■							
Penyusunan naskah skripsi										■	■	■	■	■	■	■	
Sidang naskah skripsi																	■
Revisi naskah skripsi																	■

